ANALISIS BIAYA MANFAAT PROGRAM KESERASIAN SOSIAL SEBAGAI UPAYA PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI INDONESIA

Okta Dwi Permana, Binahayati Rusyidi, Dinar Kharisma

Program Pascasarjana Kesejahteraan Sosial, Universitas Padjadjaran

E-mail: oktia22001@mail.unpad.ac.id, binahayati.rusyidi@unpad.ac.id, dinar.kharisma@bappenas.go.id

ABSTRAK

Konflik sosial di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat secara mental dan ekonomi pasca konflik. Konflik tersebut meliputi berbagai aspek, seperti konflik antar etnis dan konflik agama, yang menunjukkan adanya ketegangan antar kelompok di masyarakat. Dalam konteks penanganan konflik sosial, diperlukan program keserasian sosial yang dapat memberikan manfaat sosial yang komprehensif. Namun, terdapat kesenjangan antara hasil penelitian yang menyoroti kompleksitas konflik sosial dari berbagai sudut pandang dengan kebutuhan akan kebijakan sosial yang holistik dan terintegrasi dalam penanganan konflik sosial di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengukur manfaat sosial yang dihasilkan oleh program keserasian sosial serta evaluasi yang mendalam terkait dengan efisiensi penggunaan sumber daya dan efektivitas program dalam mencapai tujuan keserasian sosial. Selain itu, aspek biaya juga menjadi pertimbangan penting dalam penanganan konflik sosial, seperti biaya perawatan depresi dan gangguan psikososial. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut dalam hal ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kebijakan penanganan konflik sosial di Indonesia.

Kata Kunci : *Konflik Sosial, Keserasian Sosial, Analisis Biaya Manfaat*

ABSTRACT

Social conflict in Indonesia is a complex problem and has a significant impact on society mentally and economically after the conflict. The conflict covers various aspects, such as inter-ethnic conflicts and religious conflicts, which indicate the existence of tensions between groups in society. In the context of handling social conflict, a social harmony program is needed that can provide comprehensive social benefits. However, there is a gap between research results that highlight the complexity of social conflict from various perspectives and the need for holistic and integrated social policies in handling social conflict in Indonesia. Therefore, further research is needed to measure the social benefits generated by social harmony programs as well as in-depth evaluations related to the efficiency of resource use and program effectiveness in achieving social harmony objectives. In addition, the cost aspect is also an important consideration in handling social conflict, such as the cost of treating depression and psychosocial disorders. Thus, further research in this regard will make a significant contribution to the development of policies for handling social conflict in Indonesia.

Keyword : *Social Conflict, Social Harmony, Cost Benefit Analysis*

PENDAHULUAN

Setiap kali kita melibatkan diri dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan diri kita didefinisikan dalam istilah nasional. Meskipun demikian, kaum nasionalis sering mereduksi hakikat dari nasionalisme dengan mengedepankan narasi tentang sifat alami manusia untuk berkompetisi, di mana masyarakat tidak dapat berbaur tanpa konflik, menjadikan keadaan alami dalam keberagaman dan kedaulatan malah menjadi jurang pemisah yang hanya dipersatukan karena berada dalam satu wilayah negara tanpa pernah benar-benar mengecap apa itu kedaulatan diri. Indonesia sebagai negara berdaulat dengan

keberagaman sosial, budaya, dan etnis yang kaya, seringkali dihadapkan pada tantangan konflik sosial yang kompleks. Fenomena konflik sosial merupakan realitas yang tak terelakkan dalam dinamika masyarakat Indonesia. Keberagaman tersebut, sejatinya, dapat menjadi sumber kekuatan positif, namun dalam beberapa konteks, juga menjadi pemicu ketegangan, kerusuhan, kekerasan dan konflik.

Dalam sejarah Indonesia, konflik sosial dengan kekerasan kolektif yang melibatkan negara dapat dilihat dalam peristiwa G30S/PKI serta kerusuhan 1998 yang mengawali jatuhnya rezim orde baru, selain itu terjadi juga konflik antar etnis, seperti

yang terjadi antara etnis Dayak dan Madura di Kalimantan Barat, serta konflik agama, seperti kasus pembakaran vihara di Tanjung Balai, menunjukkan adanya ketegangan antar kelompok di masyarakat (Sutianti, 2020; Syahputra, 2018). Faktor-faktor seperti ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan ketegangan antar kelompok dapat memicu konflik sosial yang berpotensi menjadi ancaman serius terhadap keamanan nasional. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah kematian akibat konflik pada 2022 sebanyak 481 korban jiwa, angka ini mengalami penurunan setiap tahunnya semenjak 2015 dengan jumlah tertinggi sebanyak 704 korban meninggal akibat konflik sosial (BPS, 2022), selain itu besarnya biaya kerugian ekonomi akibat konflik yang selama ini ditanggung negara, semakin menambah urgensi dalam hal penanganan konflik.

Pendalaman pemahaman terkait konsepsi konflik sosial dapat dirunut secara historis berdasarkan penelitian dari Muliono (2021), Ia membagi Indonesia kedalam tiga periode waktu dalam mengkaji dinamika konflik berwujud kekerasan. Dimana ketiga periode ini memiliki pola konflik kekerasan yang berbeda dan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan demokrasi di Indonesia. Konflik sosial merupakan permasalahan kompleks yang merasuk ke dalam jaringan sosial dan politik negara ini. Akan tetapi sayangnya, sampai saat ini kebijakan dan program-program sosial berbasis preventif, kuratif, restoratif dan adaptif untuk menangani konflik sosial cenderung mengalami stagnansi dengan tidak adanya pembagian wewenang dan upaya-upaya kolaboratif lembaga-lembaga pemerintah untuk secara aktif bersama-sama dalam upaya penanganan bencana sosial terutama konflik sosial.

Konflik sosial terjadi ketika ada benturan kepentingan antar kelompok di masyarakat yang umumnya melibatkan tindakan-tindakan represif dan kekerasan. Merujuk pada Bartos dan Wehr (dalam Muliono, 2021), ada tiga konsep penting

dalam memahami konflik sosial yaitu benturan dan ketidaksesuaian tujuan (*goal incompatibility*); permusuhan (*hostility*); dan perilaku konflik (*conflict behavior*). Konflik sosial yang terus berlarut larut apabila tidak tertangani dengan baik, akan berkembang menjadi cikal bakal radikalisme dan aksi-aksi terorisme. Horace.M.Kallen (1998) mengurai tentang kecenderungan umum radikalisme, yakni radikalisme sebagai reaksi perlawanan terhadap situasi ketidakidealan yang terjadi, radikalisme berupaya mengganti dengan tatanan ideal menurut mereka, dan radikalisme yang mempertahankan kebenaran versi ideologi mereka (dalam Amin & Windiyastuti, 2023).

Di era kontemporer, isu-isu strategis yang melatarbelakangi terjadinya konflik sosial semakin beragam, konflik etnis dan agama, konflik kesenjangan ekonomi, konflik sosial politik, konflik agraria serta konflik akibat kerusakan dan ketidakadilan lingkungan. Signifikansi isu-isu kontemporer tersebut didukung oleh fakta bahwa isu-isu tersebut mempengaruhi kebijakan dan kesejahteraan sosial masyarakat, yang mengarah pada kerugian material, ketidakadilan, dan kerugian sosial (Delanova, 2021; Sutianti, 2020; Pratiwi & Arifin, 2019). Dengan adanya keberagaman dan kompleksitas yang telah diuraikan tersebut, maka merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, pemerintah bertanggung jawab penuh atas serangkaian kegiatan secara sistematis dan terencana yang mencakup pencegahan, penghentian, dan pemulihan konflik sosial.

Implementasi berbagai program penanganan konflik sosial melibatkan kolaborasi dan sinergitas lintas sektoral, salah satunya melalui Program Keserasian Sosial (KS) di Kementerian Sosial. Jika ditelisik secara kontekstual program, keserasian sosial dimaknai tidak hanya sebagai tujuan namun juga sebagai proses mewujudkan tujuan itu sendiri (Kemensos, 2022). Keserasian sosial diyakini sebagai kondisi ideal yang ingin dicapai oleh

rangkaian kegiatan penanganan konflik sosial, melalui program-program berbasis perlindungan sosial sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan sosial. Sejalan dengan hal itu, Rusyidi et al (2019), menyoroti perlunya program kesejahteraan sosial yang terkait dengan upaya kontraterorisme, dengan menekankan pada minimnya perencanaan pada program-program kesejahteraan sosial. Sejalan dengan itu, penelitian oleh Nulhaqim et al (2022) menyimpulkan bahwa konflik sosial dapat diatasi jika tercipta kerukunan masyarakat yang bisa dicapai melalui pelatihan dan kegiatan-kegiatan pembangunan kerukunan di masyarakat.

Adapun untuk mewujudkan kondisi ideal tersebut, tingkat keberhasilan implementasi Program Keresasian Sosial merupakan suatu kemenangan yang mutlak dan terus diupayakan melalui berbagai strategi perbaikan program. Dalam menyusun rencana strategi perbaikan program, sebaiknya didasarkan pada *empirical evidence* yang diperoleh dari hasil analisis dan evaluasi terhadap program KS. Salah satu metode analisis yang bisa digunakan yakni metode analisis biaya-manfaat. Analisis biaya manfaat melibatkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan program dengan manfaat atau hasil yang dicapai (Harahap et al., 2023). Oleh karena itu, artikel penelitian ini akan berfokus pada analisis biaya-manfaat dari Program KS. Metode analisis ini dapat mengukur dampak sosial dan ekonomi dari program, serta menyediakan cara sistematis yang dapat dijadikan landasan dalam menilai efektivitas program secara keseluruhan. Dengan demikian, diharapkan artikel penelitian ini dapat memberikan pandangan yang komprehensif untuk mendukung pengambilan keputusan dan perbaikan program di masa depan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh artikel penelitian ini yakni metode *Cost Benefit Analysis (CBA)*. CBA merupakan metode

yang digunakan untuk mengevaluasi proyek atau kebijakan dengan membandingkan manfaat dan biaya yang terkait dengan proyek atau kebijakan tersebut (Ibrahim & Djamaludi, 2022). Dalam konteks penelitian ini, CBA digunakan untuk menganalisis manfaat dari program keserasian sosial dan membandingkannya dengan biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan program tersebut. Selain itu, penelitian ini memandang pentingnya untuk memperhitungkan manfaat-manfaat yang belum diperhitungkan sebagai *multiplier-effect*, seperti manfaat peningkatan gizi, terciptanya lingkungan perumahan yang lebih baik, privasi, keamanan, martabat, dan status sosial (Yushananta & Bakri, 2021). Hal ini diharapkan dapat memperkaya analisis biaya manfaat program keserasian sosial dengan memasukkan aspek-aspek yang mungkin tidak dapat dirasakan secara langsung setelah menerima dana bantuan program.

Untuk melakukan metode analisis biaya manfaat, terlebih dulu dilakukan kajian literatur terhadap data sekunder penelitian berupa dokumen perencanaan, penganggaran, serta laporan program milik Direktorat PSKBS, Kementerian Sosial selaku pelaksana program KS yang dapat diakses oleh publik, serta penelitian terdahulu tentang program KS sebagai komparasi. Selanjutnya, langkah-langkah yang diterapkan dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) pengumpulan data terkait biaya implementasi Program KS; (2) identifikasi manfaat secara kuantitatif dan kualitatif; (3) kategorisasi biaya dan manfaat dengan mempertimbangkan indikator yang telah diidentifikasi; (4) penilaian dampak sosial dan ekonomi serta efektivitas program dengan mengukur keseimbangan antara biaya dan manfaat yang dihasilkan; dan (5) penyajian hasil analisis beserta hasil interpretasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisis *cost-benefit* untuk program KS, penting untuk melakukan

identifikasi sekaligus mempertimbangkan manfaat sosial dari program tersebut. Identifikasi manfaat program didapatkan dengan menganalisis tujuan program yang sudah dianalisis sebelumnya dengan rangkaian kegiatan yang mendukung tujuan tersebut, yakni (1) penilaian risiko; (2) perencanaan kontijensi; (3) mobilisasi sumber daya; (4) Pendidikan dan pelatihan; (5) koordinasi; (6) mekanisme respon; (7) peringatan dini; (8) manajemen informasi; dan (9) simulasi. Berdasarkan analisis tersebut, manfaat program KS yang teridentifikasi baik yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh penerima layanan yakni : 1) pengurangan risiko terjadinya konflik sosial; 2) pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan usaha ekonomi produktif; 3) peningkatan kapasitas masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan terkait keserasian sosial; dan 4) peningkatan solidaritas warga saat kegiatan diskusi tematik dan pembangunan fisik. Setelah dilakukan identifikasi manfaat sosial program, kemudian dilakukan konversi menjadi biaya manfaat sosial yang bisa juga didapat dari biaya kerugian jika terjadi konflik sosial.

Identifikasi Manfaat Sosial

Identifikasi pada manfaat sosial bisa dikategorikan berdasarkan pemangku kepentingan, seperti manfaat sosial dari perspektif masyarakat, maupun manfaat sosial dari perspektif pemerintah. Dalam perspektif masyarakat, kerugian utama yang dirasakan akibat konflik sosial dapat berupa kerugian berupa kehilangan anggota keluarga, kerusakan tempat tinggal jika konflik yang terjadi memicu kekerasan dan kerusuhan yang lebih besar. Adapun dengan adanya program KS, manfaat yang didapatkan dari program dapat menghindari biaya/kerugian akibat risiko sosial tersebut, selain itu peningkatan depresi dan gangguan mental juga menjadi salah satu risiko akibat terjadinya konflik sosial. Sama halnya dalam perspektif pemerintah, manfaat sosial yang dapat diperoleh apabila

program KS jika program ini efektif mengatasi konflik sosial yakni mengurangi anggaran pemerintah dalam penanganan kedaruratan dan penanganan pemulihan sosial akibat konflik sosial, selain itu pemerintah juga dapat berkurang biaya kerugian yang ditimbulkan akibat konflik sosial, serta berpotensi menambah PNBK dan investasi jika lokasi tujuan investasi bebas konflik. Identifikasi pada manfaat yang didapatkan oleh 100 lokasi bantuan forum keserasian sosial dengan jumlah anggota forum sebanyak 200 orang per lokasi dapat diasumsikan sebagai berikut :

Tabel 1
Identifikasi Asumsi Nilai Manfaat

No	Asumsi Manfaat	Nilai Konversi
Asumsi Manfaat Kesehatan		
1.	Penghematan Biaya Perawatan Depresi dan Gangguan Psikososial akibat Konflik	3.203.700.000
2.	Biaya Kehidupan Akibat tidak adanya korban jiwa karena konflik sosial	11.900.000.000
Asumsi Manfaat Ekonomi		
1.	Penghematan biaya sewa setelah ada pembangunan fisik dari program KS	2.000.000.000
2.	Keuntungan dari usaha ekonomi produktif	1.200.000.000
Asumsi Manfaat Ekonomi Pemerintah		
1.	Potensi penurunan biaya penanganan kedaruratan akibat pengurangan konflik sosial	400.000.000

2.	Potensi pengurangan biaya pemulihan sosial pasca konflik	2.870.000.000
3.	Potensi pengerahan relawan bencana untuk penanganan konflik	1.350.000.000
4.	Potensi pengurangan biaya santunan kepada korban konflik sosial	1.500.000.000
5.	Potensi penambahan PNBP / investasi	28.696.498.055
Total		53.520.198.055

Sumber : Diolah dari data sekunder, 2023

Adapun nilai konversi dari asumsi nilai manfaat sosial didapatkan dari berbagai sumber, baik berdasarkan hasil penelitian maupun dokumen resmi standar biaya milik pemerintah. Sebagai contoh, biaya perawatan depresi dan gangguan psikososial yakni sebesar Rp. 1.601.850 per tahun untuk satu orang (Puspitasari et al.,2020), nilai konversi didapatkan dengan mengkalikan satuan biaya dengan 2000 orang yang diasumsikan sebagai jumlah anggota masyarakat di wilayah rentan yang mendapatkan bantuan keserasian sosial. Untuk nilai konversi lainnya, satuan biaya disesuaikan dengan aturan pada Satuan Biaya Masukan (SBM) seperti besar biaya penanganan kedaruratan Rp.200.000 per orang, dan biaya santunan korban Rp.15.000.000 per orang (Kemenkeu,2022).

Identifikasi Asumsi Biaya

Selanjutnya setelah melakukan identifikasi manfaat sosial, yang perlu diingat bahwa analisis cost benefit juga harus memperhitungkan biaya yang terlibat dalam implementasi program. Dalam konteks program KS, biaya pelaksanaan

program bukan hanya didapat dari dana bantuan sosial yang ditransfer kepada masyarakat, namun biaya pendukung lain yang harus dikeluarkan untuk memastikan program KS dapat berjalan secara optimal. Hasil identifikasi *cost* secara sederhana untuk alokasi di 100 lokasi bantuan dengan jumlah anggota forum KS sebanyak 200 orang per lokasi, maka dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2
Identifikasi Asumsi Biaya

No	Uraian Asumsi Biaya	Nilai
1.	Perencanaan program KS	Rp. 119.625.000
2.	Seleksi dan asesmen	Rp. 401.490.000
3.	Penyaluran bantuan KS	Rp. 15.000.000.000
4.	Pendampingan program	Rp. 150.000.000
Total		Rp. 15.671.115.000

Sumber : Kemensos, 2022

Berdasarkan data pada tabel tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa per satu lokasi penerima bantuan program KS dengan besar anggaran Rp.156.000.000 dapat memberikan nilai manfaat sosial sebesar Rp.535.201.981 atau sekitar 1:3, dalam artian per satu lokasi program keserasian sosial dapat memberikan manfaat sosial tiga kali lipat bagi masyarakat dan pemerintah. Namun, yang perlu digarisbawahi, nilai manfaat maksimal tersebut baru bisa didapatkan apabila program KS tersebut berhasil menangani konflik sosial secara optimal di Indonesia, dalam artian selama satu tahun penuh tidak terjadi konflik sosial apapun di Indonesia.

Setelah melakukan analisis biaya manfaat pada program keserasian sosial, ditemukan bahwa program tersebut memiliki potensi untuk memberikan manfaat sosial yang signifikan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa program keserasian sosial dapat memberikan

dampak positif bagi masyarakat, seperti mengurangi ketimpangan sosial, meningkatkan harmoni sosial, dan memperkuat hubungan antarindividu dan kelompok. Selain manfaat sosial, analisis juga melibatkan komponen biaya yang terdapat dalam pelaksanaan program. Setelah dilakukan analisis pada keduanya didapatkan hasil bahwa manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut memberikan manfaat lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan.

Analisis Gap Penanganan Konflik Sosial

Setelah mengidentifikasi biaya-manfaat sosial Program KS, sebagai data pendukung lain untuk memperkuat argumentasi dan signifikansi hasil penelitian telah dilakukan kajian literatur pada artikel penelitian dan dokumen-dokumen kebijakan terkait. Penyajian hasil kajian literatur dinarasikan dalam bentuk analisis *gap*, untuk memudahkan peneliti menyusun rekomendasi. Analisis *gap* dalam penanganan konflik sosial melingkupi *gap* penelitian dan *gap* pada kebijakan sosial.

Analisis *gap* hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik sosial di Indonesia memiliki akar yang kompleks meliputi masalah-masalah sosial yang juga kompleks serta memberikan dampak terhadap kondisi masyarakat secara mental dan ekonomi pasca konflik (Agung et al., 2022). Maka, *gap* penelitian yang dapat diidentifikasi berdasarkan analisis tersebut adalah perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengukur secara lebih komprehensif manfaat sosial yang dihasilkan oleh program keserasian sosial. Selain itu, perlu juga dilakukan evaluasi yang lebih mendalam terkait dengan efisiensi penggunaan sumber daya dan efektivitas program dalam mencapai tujuan keserasian sosial.

Sementara itu, analisis *gap* kebijakan penanganan konflik sosial menyoroiti kebutuhan akan kebijakan yang memperhatikan aspek-aspek sosial-budaya, seperti peran modal sosial dalam penanganan konflik pasca bencana (Agung

et al., 2022), implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana dalam perspektif sistem-ekologi sosial (Sagala et al., 2021), serta multikulturalisme sebagai instrumen pereda konflik (Noak & Erawan, 2019). Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara hasil penelitian yang menyoroiti kompleksitas konflik sosial dari berbagai sudut pandang, adanya kebutuhan akan kebijakan sosial yang holistik dan terintegrasi dalam penanganan konflik sosial di Indonesia.

KESIMPULAN

Program Keserasian Sosial telah di desain dengan baik. Hal tersebut berdasarkan buku pedoman umum yang memuat terkait desain program, uraian objektif program, tahapan pelaksanaan dan kegiatan-kegiatan utama program secara langsung mendukung tercapainya tujuan utama program dalam penciptaan kondisi damai di masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan bencana sosial. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jauh terkait relevansi program KS dalam penanganan konflik sosial di Indonesia, dilakukan analisis mendalam menggunakan metode analisis biaya manfaat.

Berdasarkan hasil analisis biaya manfaat pada program Keserasian Sosial, ditemukan bahwa program ini memiliki potensi untuk memberikan manfaat sosial yang signifikan, seperti mengurangi ketimpangan sosial, meningkatkan harmoni sosial, dan memperkuat hubungan antar individu dan kelompok. Evaluasi biaya dan manfaat menunjukkan bahwa manfaat yang dihasilkan memberikan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan program. Namun, *gap* kebijakan yang teridentifikasi, memperlihatkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengukur secara komprehensif manfaat sosial dan melakukan evaluasi yang lebih mendalam terkait efisiensi sumber daya dan efektivitas program. Temuan ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam mendukung

keserasian sosial di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan rekomendasi dan langkah tindak lanjut yang didasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini.

Penelitian ini merekomendasikan untuk mengembangkan strategi komprehensif yang berfokus pada peningkatan koordinasi antar instansi, rekonstruksi desain program KS khususnya berkaitan dengan temuan *gap* kebijakan, dan pelaksanaan evaluasi komprehensif untuk menilai keberhasilan program. Strategi ini harus melibatkan intervensi yang ditargetkan yang bertujuan untuk mempromosikan pemahaman dan toleransi di antara berbagai kelompok masyarakat. Selain itu, berinvestasi dalam program pembangunan ekonomi dan sosial di daerah rawan konflik dapat berkontribusi pada stabilitas dan harmoni jangka panjang.

Namun, penerapan rekomendasi-rekomendasi ini mungkin menghadapi tantangan yang berkaitan dengan resistensi dari perpecahan masyarakat yang sudah mengakar, sumber daya yang terbatas, dan perlunya komitmen yang berkelanjutan dari para pemangku kepentingan baik dari kalangan pemerintah maupun non-pemerintah. Meskipun terdapat tantangan dan risiko, potensi manfaat dari membina keharmonisan dan penguatan keserasian sosial serta terciptanya stabilitas sosial sangatlah besar, sehingga upaya untuk mewujudkan rekomendasi-rekomendasi ini menjadi penting bagi kemajuan bangsa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia yang telah memberikan dukungan moril dan materiil, serta kepada Ibu Binahayati Rusyidi, dan Bapak Dinar Kharisma selaku Dosen Mata Kuliah, serta tidak lupa kepada seluruh entitas di Program Pascasarjana Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Padjadjaran.

DAFTAR PUSTAKA

Agung, Y., Yahya, Y., Fuaturosida, R., Ahda, M., Khotimah, K., & Hidayat, S.

(2022). Peran modal sosial sebagai solusi konflik pasca gempa bumi. *Journal of Indonesian Psychological Science (Jips)*, 2(1), 77-98. <https://doi.org/10.18860/jips.v2i1.16027>

Arfandi, R. and Sumiyarti, N. (2022). Analisis pembagian manfaat atas program bantuan sosial di indonesia tahun 2018. *Media Ekonomi*, 30(1), 1-15. <https://doi.org/10.25105/me.v30i1.10304>

Artiani, Listya E.(2011). Dampak Ekonomi Makro Bencana : Interaksi Bencana dan Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Nasional Informatika*, 2(11), 67-74.

Chambers, Donald E & Jane Frances Bonk. (2013). *Social Policy and Social Program : A Method For The Practical Public Policy Analyst*. New Jersey : Pearson Education.

Hariyani, I. (2016). Peran jaringan sosial pada kampanye lingkungan di media sosial: kasus kampanye melawan asap. *Informasi*, 46(1), 87. <https://doi.org/10.21831/informasi.v46i1.9652>

Hidayat, E., Sumertha, I., & Istiani, C. (2020). Perception of effective multicultural leadership: a qualitative study in western java. *Jurnal Psikologi Sosial*, 18(1), 39-52. <https://doi.org/10.7454/jps.2020.06>

Isnaini, M., Sarwoprasodjo, S., Kinseng, R., & Kholil, K. (2020). Praktik vigilantisme digital di media sosial dalam konflik antarkelompok. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 4(3), 749. <https://doi.org/10.25139/jsk.v4i3.2468>

Lestari, J. (2020). Pluralisme agama di indonesia: tantangan dan peluang bagi keutuhan bangsa. *Al-Adyan Journal of Religious Studies*, 1(1), 29-38. <https://doi.org/10.15548/al-adyan.v1i1.1714>

Lestari, T. and Sa'adah, N. (2021). Pendidikan multikultural solusi atas konflik sosial: indikasi intoleran dalam

- keberagaman. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 6(2), 140. <https://doi.org/10.17977/um021v6i2p140-154>
- Listyawati, A. (2019). Peranan forum keserasian sosial dalam mengatasi konflik sosial di ambon. *Sosio Konsepsia*, 8(2). <https://doi.org/10.33007/ska.v8i2.1496>
- Maryani, E. (2020). Implementasi pembelajaran nilai-nilai pancasila sebagai upaya mitigasi bencana sosial konflik antar etnis di ntb. *Geodika Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi*, 4(1), 32-43. <https://doi.org/10.29408/geodika.v4i1.1938>
- Noak, P. and Erawan, I. (2019). Multikulturalisme desa di bali dalam kontrol negara: implementasi dana desa bagi kegiatan lintas budaya di badung dan buleleng. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (Jisop)*, 1(2), 133. <https://doi.org/10.33474/jisop.v1i2.4808>
- Puspitasari, Irma,M., Rano.K.Suraya., Cherry Rahayu., Witriani., Uzlifatul Zannah., Auliani Hafifah., Ajeng.R.Ningtyas., & Hilda Vildayanti. (2020) Medication Profile and Treatment Cost Estimation Among Outpatients with Schizophrenia, Bipolar Disorder, Depression, and Anxiety Disorders in Indonesia. *Dove Press Journal:Neuropsychiatric Disease and Treatment*, 16, 815-828. <https://doi.org/10.2147/NDT.S240058>
- Rusyidi, B., Fedryansyah, M., & Mulyana, N. (2019). Pekerjaan sosial dan penanganan terorisme. *Sosio Informa*, 5(2), 128-142. <https://doi.org/10.33007/inf.v5i2.1765>
- Sagala, D., Wike, W., & Danar, O. (2021). Analisis implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana dalam perspektif sistem-ekologi sosial. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 007(01), 1-9. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2021.07.01.1>
- Sukardi, S. (2016). Penanganan konflik sosial dengan pendekatan keadilan restoratif. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(1), 70. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no1.49>
- Sutianti, S. (2020). Dinamika konflik antar etnis dayak dan etnis madura di samalantan kalimantan barat. *Ijd-Demos*, 2(1). <https://doi.org/10.37950/ijd.v2i1.35>
- Yushananta, P. and Bakri, S. (2021). Analisis pembiayaan peningkatan akses air minum dan sanitasi sehat dengan pendekatan cost benefit analysis (cba). *Jurnal Kesehatan*, 12(2), 306. <https://doi.org/10.26630/jk.v12i2.1855>